



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BIDANG KESEHATAN DI DESA MANDALASARI KECAMATAN CIKALONG WETAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Neng Ela Setiawati¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Bidang Kesehatan Di Desa Mandalasari Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat”. Masalah penelitian ketidakmaksimalan implementasi kebijakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga bidang kesehatan di Desa Mandalasari yang diakibatkan karena kurangnya sosialisasi mengenai program dan fasilitas yang kurang mendukung jalannya program tersebut. Identifikasi masalah yaitu bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga di bidang kesehatan yang ada di Desa Mandalasari. Penelitian menggunakan teori Menurut Edward III dalam (Widodo, 2021: 96-110) meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Informan penelitian adalah Kepala Desa Mandalasari, Ketua Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Mandalasari, Kepala Bidang Kesehatan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Mandalasari, Kader Posyandu Desa Mandalasari dan Masyarakat Desa Mandalasari. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi tidak berjalan maksimal dikarenakan beberapa permasalahan yang masih terjadi dan ditemukan peneliti dalam dimensi sumber daya manusia dan peralatan yaitu masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat desa dan fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang memadai di beberapa RW yang ada di Desa Mandalasari.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kesehatan Keluarga

Abstract

This study is entitled "Implementation of the Health Sector Family Welfare Empowerment Policy in Mandalasari Village, Cikalong Wetan District, West Bandung Regency". The research problem is the inadequate implementation of family welfare empowerment policies in the health sector in Mandalasari Village due to the lack of socialization of the program and facilities that do not support the program. Problem identification is how the implementation of family welfare empowerment policies in the health sector in Mandalasari Village. The research uses the theory according to Edward III in (Widodo, 2021: 96-110) including communication, resources, disposition and bureaucracy. The research informants were the Head of Mandalasari Village, the Head of the Mandalasari Village Family Welfare Empowerment Program, the Head of the Health Division of the Mandalasari Village Family Welfare Empowerment Program, the Mandalasari Village Posyandu Cadres and the Mandalasari Village Community. Descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques include literature study, observation, interviews and documentation with data analysis techniques including data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation did not run optimally due to several problems that still occurred and were found by researchers in the dimensions of human resources and equipment, namely the lack of socialization to the village community and inadequate facilities and infrastructure in several RW in Mandalasari Village.

Keywords: Policy Implementation, Empowerment of Family Welfare, Family Health

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang dimana keberadaanya dapat diukur dari berbagai jenis faktor. Diantaranya, seperti faktor kondisi keuangan, infrastruktur, hingga kesejahteraan warganya di seluruh aspek kehidupan. Dimana kesejahteraan ini menyangkut suatu hal yang sangat penting yaitu adalah kesehatan. Pada dewasa ini, masih banyak ditemukan permasalahan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Khususnya, kualitas dan kesehatan yang menjadi tanggungjawab bersama. Di Indonesia sendiri, masih banyak masalah yang berkaitan dengan kesehatan Masyarakat. Masalah Kesehatan yang terjadi saat ini salah satunya adalah mengenai kurangnya kecukupan gizi bagi anak-anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak di negeri kita ini anak-anak yang terancam dalam masalah kesehatan, dimana anak-anak ini terancam permasalahan seperti gizi buruk. Tentu gizi buruk adalah

salah satu hasil yang disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang dibawah garis kesejahteraan atau dapat dikatakan di bawah garis kemiskinan.

Merespon permasalahan kemiskinan dan kondisi masyarakat yang jauh dari kata sejahtera, pemerintah selain dengan usaha menciptakan sistem perekonomian yang sifatnya mendasar, perlu pula suatu usaha yang sifatnya teknis dan lebih pada pelaksanaan langsung di lapangan. Tentunya ada berbagai macam tujuan dari hal yang dilakukan ini, diantaranya adalah agar penanggulangan dapat dilakukan sesegera mungkin dalam mengantisipasi keadaan sosial yang sangat amat memprihatinkan ini. Ada beberapa program dari pemerintah untuk mengupayakan dan mengentaskan atau mengangkat masyarakat dari kemiskinan agar anak-anak mendapatkan kecukupan gizi dan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan, diantaranya terkait program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hak hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial di sektor ekonomi, serta memperkuat martabat manusia dan bangsa. Jelas pada intinya upaya tersebut diharapkan untuk menciptakan sebuah peningkatan dalam sektor usaha, dan upaya lain untuk mengurangi beban orang-orang yang berada di garis kemiskinan (Andrianto, 2013).

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau yang dapat kita pahami sebagai (PKK) adalah sebuah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan wanita sebagai promotor penggerak. Pada dasarnya sebuah keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, oleh karena itu dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Maka, harus dimulai dari keluarga itu sendiri. PKK sebagai wadah kegiatan masyarakat khususnya kaum wanita bertujuan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, maju dan mandiri.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dituntut untuk menyesuaikan diri dan sekaligus melakukan adaptasi terhadap tata nilai yang berkembang. Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh jajaran PKK hendaknya terus mengikuti dan memantau situasi yang berkembang dimasyarakat tanpa mengesampingkan lingkungan strategisnya (Lita Azriani, 2015:2). Kegiatan yang di lakukan oleh PKK di Desa Mandalasari sudah berjalan cukup baik. Di dalam PKK tersebut ada bidang yang menjadi unggulan dan tampak modal sosial didalamnya yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan keterampilan. Peningkatan dalam bidang kesehatan dan pendidikan keterampilan ini sangat perlu dilakukan karena menjadi sebuah modal utama. Tujuan dari pengunggulan bidang ini yaitu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama anggota PKK itu sendiri yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menggali potensi dan kemampuan dalam diri yang akan berpengaruh pada kesejahteraan khususnya kesejahteraan kehidupan keluarga yang terlihat dari manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan bidang kesehatan dan pendidikan keterampilan PKK yang akan menciptakan keluarga sesuai dengan tujuan gerakan PKK yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang akan dikaji bersifat sosial dan dinamis karena subjek yang diamati dalam penelitian ini adalah manusia yang merupakan subjek yang dinamis dan fleksibel. Fenomena masalah yang diteliti juga bersifat dinamis karena dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif untuk dapat menentukan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Peneliti melihat bahwa permasalahan ini dapat dikaji dengan metode wawancara untuk mendapatkan

jawaban yang lebih mendalam dari informan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dimana penyajian data berbentuk kata- kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Sesuai dengan pendapat Creswell bahwa penelitian kualitatif merupakan metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan- pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2017).

PEMBAHASAN

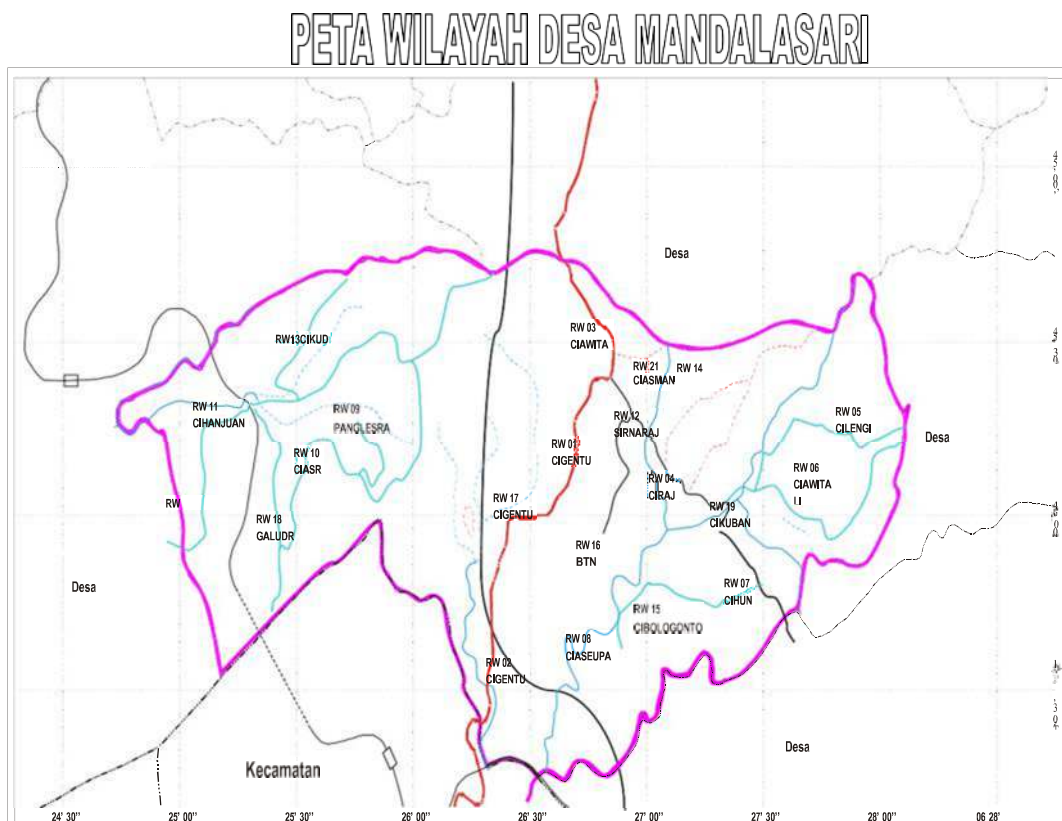
Berdirinya Desa Mandalasari adalah hasil pemekaran Desa dari Desa Rajamandalawetan berdasarkan Surat keputusan Pemerintah Kabupaten DT II Bandung sehubungan dengan luas daerah dan kepadatan Penduduknya telah melebihi ketentuan pemekaran Desa,yang sekarang Desa asal diganti namanya menjadi Desa Mandalamukti. Dengan dimekarkanya Desa Mandalamukti menjadi dua Desa,maka pada tanggal 02 Oktober 1982 diresmikanlah Desa Mandalasari dengan SK Bupati No.14/146.2/Pem.Ds/82 sebagai Desa yang resmi berdiri sendiri,berpemerintahan sendiri seperti Desa Desa yang lainnya.

Terbentuknya nama Desa Mandalasari berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Masyarakat dalam menentukan Nama Desa Mandalasari diambil dari riwayat Desa Rajamandalawetan dimana pada saat itu menurut keterangan sala seorang sesepuh Desa, bahwa dahulu zaman hindia belanda Rajamandala wetan berarti menanti seorang Manusia yang memberi petunjuk (Rojaman-Dalat), kemudian datanglah di zaman itu seorang tokoh dari daerah RajamandalaKulon mendiami daerah Rajamandalawetan,

ternyata Tokoh itu adalah seorang dalem yang berkuasa bernana “ RD.ANGGADASA “.

Kondisi Geografis Desa Mandalasari

Desa Mandalasari terletak di sebelah Selatan Kota Kecamatan Cikalongwetan, yang jaraknya kurang lebih 3 Km dari Kantor Kecamatan Cikalongwetan, dengan luas Wilayah 1022,48 Hektar yang terdiri dari 4 Dusun dengan 21 Rukun Warga (RW) dan 66 Rukun Tetangga (RT) yang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat. Secara Visualisasi, wilayah administratif dapat dilihat dalam Peta Wilayah Desa Mandalasari sebagai berikut :



Ditinjau dari segi geografisnya wilayah desa Mandalasari termasuk dataran rendah beriklim sedang dengan ketinggian tanah

+319 m diatas permukaan laut.Suhu udara antara 170C sampai 320C, memiliki duamusim, yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan curah hujan rata rata 2.100 mm per tahun.

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan,

tetapi dari sisi lain juga bisa menjadi beban untuk suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi, karena penduduk yang banyak merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Jenjang pendidikan orang tua, terutama ibu yang mengatur seluruh kegiatan dalam keluarga sangatlah berpengaruh penting terhadap pendidikan dan kesehatan pada anak.

Ditinjau dari segi geografisnya wilayah desa Mandalasari termasuk dataran rendah beriklim sedang dengan ketinggian tanah +319 m diatas permukaan laut.Suhu udara antara 170C sampai 320C, memiliki duamusim, yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan curah hujan rata rata 2.100 mm per tahun.

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, tetapi dari sisi lain juga bisa menjadi beban untuk suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi, karena penduduk yang banyak merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Jenjang pendidikan orang tua, terutama ibu yang mengatur seluruh kegiatan dalam keluarga sangatlah berpengaruh penting terhadap pendidikan dan kesehatan pada anak.

Di Desa Mandalasari ada berbagai macam mata pencaharian kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian besar kepala keluarga Desa Mandalasari bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas/ buruh bangunan yaitu 39,02%. Posisi kedua yaitu kepala keluarga yang bermata pencaharian sebagai buruh tani yaitu 28,02%.

Nama-Nama Kepala Desa Mandalasari

Sejak berdirinya Desa Mandalsari berdasarkan Surat keputusan Pemerintah Kabupaten DT II Bandung tanggal 02 Oktober 1982 dengan SK Bupati No.14/146.2/Pem.Ds/82 sebagai Desa yang resmi berdiri sendiri, dengan tongkat kepemimpinan di pegang langsung oleh Bapak Doli Pudoli sebagai Sekretaris Desa Rajamandala wetan berdasarkan hasil musyawarah dengan kedudukan sebagai pejabat Kepala Desa pertama di Desa Mandalasari, seiring dengan perputaran waktu Desa Mandalasari

telah di pimpin oleh beberapa orang pemimpin dengan status sebagai berikut:

1. Doli Pudoli (1982-1990)
2. Oha Suherman (1990-1997)
3. Anun Rukmana (1997-2000)
4. Asep Saepulah (2001-2006)
5. Hamdan Sulaeman (2007-2012)
6. Adey (2013-2018)
7. Adey (2020-2025)

Visi Misi Desa Mandalasari

Visi Desa Mandalasari adalah : “SEHATI” (Sehat, Agamis, Tentram dan Indah).

- SEHAT, Mengandung arti bahwa seluruh komponen pembangunan harus ditunjang dengan jiwa yang sehat yaitu sehat jasmani dan sehat rohani.
- AGAMIS, Mengandung pengertian bahwa keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- TENTRAM, Mengandung pengertian apabila seluruh komponen di atas dilaksanakan maka akan terwujud suasana kerja yang aman, damai dan tentram.
- INDAH, Mengandung pengertian apabila masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa sudah seiring dan sejalan dalam pembangunan di Desa Mandalasari, maka apapun hasilnya akan terasa lebih indah.

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa

Mandalasari, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Mandalasari adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih, jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil dan peduli.
2. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Meningkatkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat.
5. Memantapkan kesolehan social berlandaskan nilai-nilai keagamaan, keimanan, dan ketaqwaan.
6. Menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA)
7. Memelihara kesehatan dan keseimbangan lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa.
9. Modernisasi Desa melalui peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Struktur Organisasi Desa Mandalasari

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mandalasari adalah sebagai berikut:

Kepala Desa	: Adey
Sekretaris Desa	: Asep Suhendar
Kaur Keuangan	: Welly Mochamad Fauzi
Kaur Umum	: Feni Agustina
Kaur Perencanaan	: Heryanto Agustina
Kasi Pemerintahan	: Dadang Saepul Bahri
Kasi Pelayanan	: Dinar Gusti Andini
Kasi Kesra	: Mochammad Giandi Chiko
Rubiana Kepala Dusun 1	: E. Jaenudin
Kepala Dusun 2	: Ujang Saepudin
Kepala Dusun 3	: Oha Ropidin
Kepala Dusun 4	: Lupi Pristiana
Staff Keuangan	: Jenal Abidin

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Bidang Kesehatan Di Desa Mandalasari Kabupaten Bandung Barat, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal berdasarkan 4 dimensi yang telah dijelaskan dan dianalisis sebagai berikut:

a. Dimensi Komunikasi

PKK Desa Mandalasari selalu rutin memberikan sosialisasi kepada para warga. Sosialisasi tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali saat ibu-ibu berkumpul di Posyandu ketika penimbangan bayi maupun pemeriksaan ibu hamil. Hal tersebut dilakukan karena lebih efektif memberikan sosialisasi.

b. Dimensi Sumber Daya

Sarana dan prasarana yang tersedia sejauh ini masih dikatakan belum memadai. Hal tersebut juga ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang sering mengeluh karena prasarana yang ada belum lengkap bahkan ada yang sudah tidak layak untuk digunakan. Kurangnya prasarana ini dapat menghambat pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat sehingga tujuan dalam mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

c. Dimensi Disposisi

Edukasi atau sosialisasi tidak dilakukan semaksimal mungkin selain saat jadwal posyandu atau pemeriksaan ibu hamil dikarenakan warga desa sulit berkumpul bersama di suatu tempat karena memiliki urusannya masing-masing.

d. Dimensi Birokrasi

Pemerintah Desa Mandalasari aktif mengikutsertakan para kader PKK Desa Mandalasari di acar seminar atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah

Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, Pemerintah Desa Mandalasari juga sering melakukan evaluasi kepada para kader PKK dan bersama-sama mengatasi segala macam permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Creswell, W. John. 2017. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.

Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.

Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rusdi, N. I. (2018). *Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun*.

Subarsono. A. 2022. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

JURNAL

Alimuddin, F. (2021). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Kewirausahaan*.

Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127-140.

Maningkue, R. L., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2022). Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. *Governance*, 2(1).

MUHSIN, A. M. H. (2023). MAKNA PENTING BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN.

Ratri, D. K. (2014). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun. 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.*

Utami, A. (2022). *Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan Keterampilan Perempuan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Medan.*

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Menteri Republik Indonesia No 1 tahun 2013 tentang
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

